

## KATA PENGANTAR

Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, secara tegas menyebutkan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Institut Seni Budaya Indonesia Aceh adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kota Jantho, 31 Desember 2020

Rektor

  
Dr. Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA  
NIP 196205261987101001

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Surat Pernyataan telah Direviu	iii
Pernyataan Tanggung Jawab	iv
Ringkasan	5
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	5
III. Laporan Operasional	3
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Penjelasan Umum	11
A. Catatan atas Laporan Keuangan	11
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	27
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	36
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	51
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	58
F. Pengungkapan Penting Lainnya	62
VI. Lampiran dan Daftar	

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2020 (AUDITED)**  
**INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH**

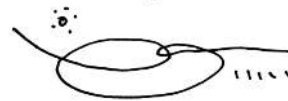
Kami telah mereviu Laporan Keuangan Tahun 2020 (Audited) Institut Seni Budaya Indonesia Aceh DIPA 023.677538 berupa Neraca per tanggal 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah merupakan penyajian manajemen Institut Seni Budaya Indonesia Aceh.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Reviu mempunyai ruang lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang bertujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas disajikan sesuai dengan Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Jantho, 31 Desember 2020

Ketua SPI,



Yulfa Haris Saputra M.Sn.

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kota Jantho, 31 Desember 2020

Rektor



Dr. Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA  
NIP 196205261987101001

Laporan Keuangan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh Periode 31 Desember 2020 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2020 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.1.114.394.507 atau mencapai 101 persen dari PAGU yang tersedia sebesar Rp.1.100.000.000,- Yang diperoleh dari Pendapatan Biaya Pendidikan.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. Rp.1.114.394.507,- atau mencapai 0 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.1.100.000.000.

*Ringkasan Laporan realisasi Anggaran Triwulan TA 2020 dan 2019*

Uraian	TA 2020			TA 2019
	Anggaran	Realisasi	% Real. Thd Anggaran	Realisasi
Penerimaan Negara	1.100.000.000	1.114.394.507	101,31	-
Belanja Negara	12.435.584.000	9.971.025.699	80,18	-

### 2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2020.

Nilai Aset per 31 Desember 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp36.226.897.905 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp18.234.366.; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Uang Muka dari KPPN Rp. 0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp36.207.807.889; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.855.650.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp36.226.897.905.

### 3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Jumlah Pendapatan Negara bukan pajak Lainnya untuk periode sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.1.114.133.229, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp.9.695.232.612 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp(8.581.099.383). Sehingga Jumlah Surplus/ (Defisit) – LO sebesar Rp.

( 8.581.099.383).

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp.0 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(8.581.099.383) ditambah dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp44.807.671.912 dan terjadi penurunan Ekuitas sebesar Rp.36.226.897.905 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2020 adalah senilai Rp36.226.897.905

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Periode 31 Desember 2020 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH  
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN  
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2020 DAN 30 Desember 2019

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30/06/2020		% thd Angg	30/06/2019
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
<b>PENDAPATAN</b>					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.100.000.000	1.114.394.507	101,31	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.100.000.000</b>	<b>1.114.394.507</b>	<b>101,31</b>	<b>-</b>
<b>BELANJA</b>	<b>B.2.</b>				
Belanja Pegawai	B.3	4.103.246.000	2.964.829.239	72,26	-
Belanja Barang	B.4	7.581.464.000	6.317.388.460	83,33	-
Belanja Modal	B.5	750.874.000	688.808.000	91,73	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	0,00	-
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>12.435.584.000</b>	<b>9.971.025.699</b>	<b>80,18</b>	<b>-</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH**  
**NERACA**  
**PER 31 Desember 2021 DAN 31 Desember 2019**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30/09/2020	30/09/2019
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	64.098	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	18.234.366	-
Jumlah Aset Lancar		<b>18.298.464</b>	-
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.14	26.205.300.000	-
Peralatan dan Mesin	C.15	6.784.433.560	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	46.400.000	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	527.278.923	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	7.466.497.000	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	(4.822.101.594)	-
Jumlah Aset Tetap		<b>36.207.807.889</b>	-
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tidak Berwujud	C.21	3.422.600	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(2.566.950)	-
Jumlah Aset Lainnya		<b>855.650</b>	-
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>36.226.962.003</b>	-
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		-	-
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.28	36.226.897.905	-
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>36.226.897.905</b>	-
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>36.226.897.905</b>	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan



**INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2020 Dan 31 Desember 2019**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30/09/2020	30/09/2019
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.114.133.229	-
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>1.114.133.229</b>	<b>-</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	2.964.829.239	-
Beban Persediaan	D.3	31.031.437	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	4.972.446.422	-
Beban Pemeliharaan	D.5	386.542.735	-
<b>Beban Perjalanan Dinas</b>	D.6	852.085.838	-
<b>Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat</b>	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	488.296.941	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Beban Transfer			
Beban Lain-lain			
<b>JUMLAH BEBAN OPERASIONAL</b>		<b>9.695.232.612</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(8.581.099.383)</b>	<b>-</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari kegiatan Non Operasional lainnya		-	-
Jumlah Surplus/(defisit) dari kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
<b>SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>		<b>(8.581.099.383)</b>	<b>-</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>			
	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
<b>SURPLUS/DEFISIT LO</b>		<b>(8.581.099.383)</b>	<b>-</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

## IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

### INSTITUT SENI BUDAYA INDONESIA ACEH LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 31 DESEMBER 2019

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	30/09/2020	30/09/2019
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(8.581.099.383)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3	325.376	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	325.376	-
JUMLAH		325.376	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	44.807.671.912	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5	36.226.897.905	-
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>E.6</b>	<b>36.226.897.905</b>	<b>-</b>

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan*

## V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

### A. PENJELASAN UMUM

#### A.1. Dasar Hukum

*Dasar Hukum  
Entitas dan  
Rencana Strategis*

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KM.06/2014 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset

Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;

15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember, Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1925.

## **A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Universitas Jember**

Institut Seni Budaya Indonesia Aceh merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri Seni Budaya yang diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 06 Oktober 2014 di Surabaya dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2014 tanggal 06 Oktober 2014. Saat ini ISBI Aceh memiliki lahan 30 Ha di Kota Jantho, yang nantinya akan dibangun kampus terpadu.

Sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi Negeri Seni Budaya Aceh di Sumatera. ISBI Aceh saat ini memiliki 2 Fakultas dengan 5 Program Studi, yaitu:

### **1. Fakultas Seni Pertunjukan (FSP)**

- a. Program Studi Seni Karawitan
- b. Program Studi Seni Tari
- c. Program Studi Teater
  - Penyutradaraan
  - Pemeranan

### **2. Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD)**

- a. Program Studi Seni Murni
  - Seni Lukis
  - Seni Grafis
  - Seni Rupa
- b. Program Studi Seni Kriya
  - Kriya Kayu
  - Kriya Keramik

- Kriya Logam
- Kriya Kulit
- c. Program Studi Desain Komunikasi Visual

Sebagai salah satu institusi pendidikan tinggi bidang seni, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh memiliki fungsi yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik untuk kebutuhan lokal, nasional maupun regional. Sebagai salah satu Institut Seni di Aceh yang mengutamakan mutu, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh mengintegrasikan nilai-nilai universal, nasional, dan lokal untuk melahirkan sumberdaya manusia yang memiliki keselarasan dalam antara IPTEK, Ilmu Seni dan IMTAQ. Keseimbangan diantara keduanya menjadi komponen utama dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, berbudi pekerti, menjunjung tinggi etika, estetika serta berakhlak mulia.

#### **A.1.1. Visi Institut Seni Budaya Indonesia Aceh**

Visi Institut Seni Budaya Indonesia Aceh adalah ***“mewujudkan lembaga pendidikan tinggi seni dan budaya yang menghasilkan insan akademis, kreatif, mandiri, berkepribadian, dan berkebudayaan melayu”***.

#### **A.1.2. Misi Institut Seni Budaya Indonesia Aceh**

1. Menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan menghasilkan lulusan yang bermoral dan berintegritas tinggi menuju masyarakat kreatif dan humanis sesuai dengan nilai-nilai sosial, kultural dan religius.
2. Mengembangkan semangat penelitian dan pengabdian yang berorientasi kepada kepentingan dan kemajuan bangsa dan negara.
3. Mewujudkan perguruan tinggi yang memiliki elan vital semangat hidup kepada pengembangan pengetahuan dan karya seni budaya di tingkat lokal, nasional dan internasional.
4. Membangun kerjasama antar lembaga, institusi dan unsur-unsur lainnya yang relevan.

#### **A.1.3. Tujuan dan Sasaran Institut Seni Budaya Indonesia Aceh**

1. Membangun wadah pendidikan tinggi di bidang seni dan budaya yang bermutu, relevan dan berdaya saing tinggi,
2. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing, berakhlak mulia, kreatif, berwawasan luas, dan tanggap terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat sehingga mampu berperan dalam pembangunan bangsa.

3. Menghasilkan penelitian, publikasi dan produk seni dan budaya unggulan yang berdayaguna bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang seni dan budaya serta masyarakat pengguna.
4. Meningkatkan keterlibatan seniman dan penggiat budaya dalam melindungi, mengembangkan dan mempromosikan potensi budaya lokal dalam lingkup nasional dan internasional.
5. Meningkatkan apresiasi dan kebanggaan masyarakat terhadap seni dan budaya lokal.

### **Sasaran Strategis**

1. Menjadi institusi perguruan tinggi yang terakreditasi dan berbadan hukum (BLU/BH).
2. Menjadikan ISBI Aceh sebagai salah satu lembaga pendidikan bermutu dan daya saing tinggi.
3. Menghasilkan produk seni dan budaya berbasis pendidikan yang berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat luas.

Mencermati visi, misi, dan tujuan ISBI Aceh, secara tersirat terlihat bahwa sebuah perguruan tinggi maju, modern, dan unggul harus mampu disetarakan sebagai “*world class university*”. Perguruan Tinggi yang maju ini tidak boleh tercerabut dari akarnya, yaitu kebudayaan. *World class university* ini merupakan cita-cita yang harus dituju. Hal ini merupakan hal yang tidak mudah dicapai, memerlukan perjuangan dan kerja keras.

Dengan ditetapkan sasaran ini akan tampak suatu petunjuk arah yang akan menumbuhkan inspirasi dan motivasi seluruh keluarga besar ISBI Aceh. Untuk merealisasikan tujuan ini harus disusun arah pengembangan (*road map*) yang jelas dan dilaksanakan secara bertahap.

*Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan*

### **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2020 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi

Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

### *Basis Akuntansi*

#### **A.3. Basis Akuntansi**

Institut Seni Budaya Indonesia Aceh menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

### *Dasar Pengukuran*

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

### *Kebijakan Akuntansi*

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Periode 31 Desember 2020 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik

yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh adalah sebagai berikut:

#### *Pendapatan-LRA*

##### **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### *Pendapatan-LO*

##### **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

#### *Belanja*

##### **(3) Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang



mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## *Beban*

### **(4) Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

## *Aset*

### **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

## *Aset Lancar*

### **a. Aset Lancar**

#### **Definisi**

Aset ialah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh dan dapat diukur dalam satuan uang.

Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

- Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
- Dalam bentuk kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi.

Aset lancar disajikan berdasarkan urutan likuiditas, meliputi antara lain:

#### 1. Kas dan Setara Kas

Kas ialah alat pembayaran yang sah yang setiap saat dapat digunakan untuk kegiatan operasional. Setara Kas ialah investasi jangka pendek yang sangat likuid dan segera dapat ditunaikan serta bebas risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas Universitas Jember terdiri atas saldo kas di rekening bendahara pengeluaran, saldo rekening bendahara penerima, saldo rekening bendahara pengeluaran pembantu, dan saldo uang tunai.

##### a. Pengakuan

Kas dan Setara Kas diakui pada saat terjadinya aliran kas masuk.

##### b. Pengukuran

Kas dan setara kas diukur sebesar nilai nominal pada saat diterima.

##### c. Pengungkapan

Kas dan setara kas disajikan di laporan posisi keuangan (neraca) pada urutan pertama dalam kelompok aset lancar.

#### 2. Piutang Bukan Pajak

Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya per tanggal neraca.

Dalam hal ini merupakan piutang dari pendapatan pendidikan, yaitu piutang yang timbul dari jasa pendidikan, seperti:

- Piutang dari pendapatan SPP/Uang Kuliah Tunggal (UKT)
- Piutang dari Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI).

Penyisihan piutang tak tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

a. Pengakuan

Piutang SPP/UKT diakui pada saat batas akhir tanggal pembayaran sesuai dengan surat keputusan dan tidak disertai dengan pembayaran oleh mahasiswa yang didukung oleh tanda bukti surat penundaan oleh pejabat berwenang, berlaku sampai dengan 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal disetujuinya surat penundaan. Piutang SPI diakui pada saat batas akhir yaitu satu semester yang ditetapkan tidak terbayarkan sehingga sampai masuk periode semester berikutnya.

b. Pengukuran

Piutang diukur berdasarkan Daftar Piutang dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam ketetapan tersebut.

Kategori yang bisa diakui sebagai piutang :

1. Mahasiswa aktif yang mengajukan penundaan.
2. Mahasiswa yang belum membayar melebihi batas akhir penundaan.

c. Penghapusan

Dalam hal piutang yang telah dibentuk penyisihannya diyakini tidak akan tertagih maka dapat menghapuskan piutang sesuai peraturan perundang-undangan.

Penghapusan piutang dilakukan apabila piutang telah diserahkan kepada panitia urusan piutang negara (DJKN) atau telah diterbitkannya surat keputusan *drop out*.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai

perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
  - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	3. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	4. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca

dikalikan dengan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

## Aset Tetap

### b. Aset Tetap

#### Definisi

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Universitas Jember atau dimanfaatkan oleh pihak lain. Dengan batasan pengertian tersebut maka Universitas Jember harus mencatat suatu aset tetap yang dimilikinya meskipun aset tetap tersebut digunakan oleh pihak lain. Universitas Jember juga harus mencatat hak atas tanah sebagai aset tetap.
- b. Suatu aset diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria :
  1. Berwujud
  2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan
  3. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
  4. Tidak dimaksudkan untuk dijual atau dibagikan kepada masyarakat, tetapi digunakan dalam kegiatan operasional Institut Seni Budaya Indonesia Aceh dan kegiatan operasional pihak lain selama hak kepemilikan tidak berpindah tangan.

#### Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi aset tetap adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan BMN dan laporan keuangan.

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (Satu Juta rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (Dua Puluh Lima juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Prsedien Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementeroian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian Negara/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian berupa Tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal ini aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Penyusutan Aset  
Tetap

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

**c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - a. Tanah
  - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

## Piutang Jangka Panjang

### Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

## Aset Lainnya

### d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis



lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2016 Tanggal 31 Desember 2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

*Kewajiban*

**(6) Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - a. Kewajiban Jangka Pendek
 

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

## **(7) Ekuitas**

### *Ekuitas*

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

### *Implementasi*

### *Akuntansi*

### *Berbasis Akrua*

### *Pertama Kali*

## **(8) Implementasi Akuntansi Berbasis Akrua Pertama Kali**

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

## B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi

Pendapatan

Rp.1.114.394.507

### B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp1.114.394.507 atau mencapai 101,31 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.100.000.000. Pendapatan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh terdiri dari Pendapatan Uang Pendidikan, Pendapatan Jasa dan Pendapatan Pendidikan Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan*

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	-	-	
Pendapatan Uang Pendidikan	1.100.000.000	1.114.394.507	101,31
Pendapatan Jasa	-	-	
Pendapatan Pendidikan Lainnya	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>1.100.000.000</b>	<b>1.114.394.507</b>	<b>101,31</b>

Adapun Realisasi Pendapatan Uang Pendidikan TA 2020 dari :

1. Pendapatan Biaya Pendidikan (425412) Sebesar Rp. 0.

*Perbandingan Realisasi PNBP 30 September 2020 dan 30 September 2019*

URAIAN	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A. 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan jasa	-	-	0,00
Pendapatan PNBP	1.114.394.507	-	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.114.394.507</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>

Realisasi Belanja

Negara

Rp9.971.025.699

### B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.971.025.699 atau 80,18% dari anggaran belanja sebesar Rp12.435.584.000. Secara garis besar belanja Institut Seni Budaya Indonesia Aceh dikelompokkan kedalam 3 Golongan belanja dengan rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

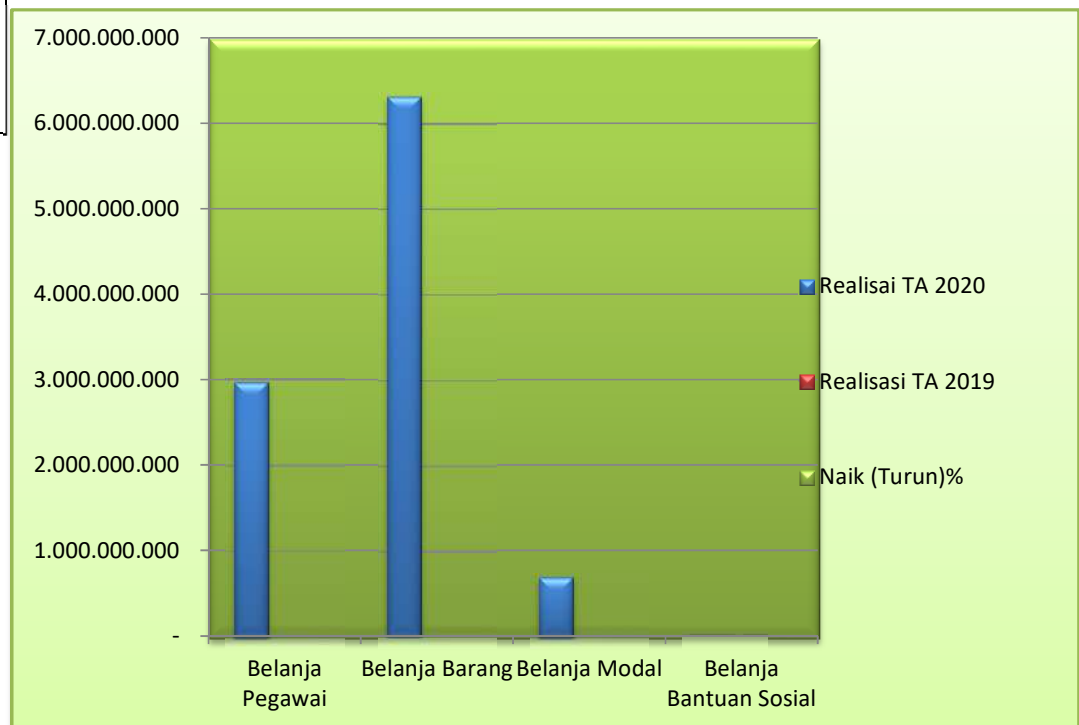
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2020

Uraian	2020		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	4.103.246.000	2.964.829.239	72,26
Belanja Barang	7.581.464.000	6.317.388.460	83,33
Belanja Modal	750.874.000	688.808.000	91,73
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
<b>Total Belanja Kotor</b>	<b>12.435.584.000</b>	<b>9.971.025.699</b>	<b>80,18</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>12.435.584.000</b>	<b>9.971.025.699</b>	<b>80,18</b>

Perbandingan Realisasi Belanja 30 September 2020 dan 30 September 2019

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2019	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang	-	-	
Belanja Modal	-	-	
Belanja Bantuan Sosial	-	-	
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.964.829.239 dan Rp.0. Realisasi Belanja Pegawai TA 2020 ada karena satker Institut Seni Budaya Indonesia Aceh (677538) sebagai entitas akuntansi

*Belanja Pegawai*  
*Rp2.964.829.239*

dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Aceh ( BA 023) merupakan satker baru yang mengalami perubahan unit eselon pada TA 2020 yang selesai proses likuidasi pada agustus 2020 dari BA 042 ke BA 023 .Beban Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

*Perbandingan Belanja Pegawai TA 2020 dan 2020*

Uraian	Realisasi TA 2020	Realisasi 2019	Naik (Turun) %
Belanja gaji dan Tunjangan PNS	2.893.920.481	0	
Belanja Lembur	70.909.000	0	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>2.964.829.481</b>	<b>0</b>	
pengembalian Belanja Pegawai	242	0	
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>2.964.829.239</b>	<b>0</b>	

*Belanja Barang*  
*Rp6.317.388.460*

**B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp6.317.388.460 dan Rp0. Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2020 mengalami kenaikan 0% dari Realisasi Belanja Barang TA 31 September 2019. Hal ini antara lain disebabkan Karena Ini Satker Baru yang selesai likuidasi dari dari BA 042 pada Bulan Agustus 2020 jadi tidak ada kenaikan atau penurunan. Rincian Belanja Barang Semester II akan kami rincikan dalam table dibawah ini.

Perbandingan Belanja Barang dan jasa per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 2020	Realisasi TA 2019	Naik (Turun) %
5211 Belanja Barang Operasional	2.819.127.600	0	-
5212 Belanja Barang Non Operasional	1.310.224.200	0	-
5218 Belanja Barang Persediaan	55.024.000	0	-
5221 Belanja Jasa	843.094.622	0	-
5231 Belanja Pemeliharaan	437.832.200	0	-
5241 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	852.085.838	0	-
Belanja barang yang diserahkan Kepada Masyarakat/pemda	-	0	-
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>6.317.388.460</b>	<b>0</b>	
Pengembalian Belanja	0	0	
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>6.317.388.460</b>	<b>0</b>	

Penjelasan Belanja Barang TA 2020 adalah sebagai berikut:

1. Belanja Barang Operasional sebesar Rp. 2.819.127.600 terdiri dari belanja keperluan perkantoran(521111) sebesar Rp.2.584.786.600,-,Belanja pengiriman Surat Dinas Pos Pusat (521114) sebesar Rp. 1.225.000,-, belanja honor operasional satuan kerja (521115) sebesar Rp. 219.783.000,-, dan Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19 (521131) Rp. 11.605.000,-.
2. Belanja Barang Non operasional Sebesar Rp.1.310.224.200,-, terdiri dari Belanja bahan (521211) sebesar Rp.394.946.200,-, Belanja Honor Output Kegiatan sebesar (521213) Rp.80.700.000, Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) Sebesar Rp.793.138.000,-, dan Belanja Barang Non Operasional- Penanganan Pandemi Covid-19 sebesar RP.41.440.000,-.
3. Belanja Barang Persediaan sebesar Rp.55.024.000,- merupakan belanja yang digunakan untuk membeli barang persediaan berupa barang konsumsi seperti ATK,bahan cetakan dan alat-alat rumah tangga. Pada TA 2020, belanja barang persediaan yang menggunakan akun 521811 sebesar RP.55.024.000
4. Belanja Pemeliharaan jasa sebesar RP. 843.094.622,- terdiri dari belanja langganan listrik (522113) sebesar Rp.219.255.954,-, Belanja Langganan Air (522113) sebesar Rp.36.225.800,-, Belanja sewa (522141) sebesar Rp.305.603.000,-, Belanja Jasa Profesi sebesar(522151) Rp. 168.000.000,-dan

Belanja jasa Lainnya (522191) Sebesar Rp.114.009.868.

5. Belanja Pemeliharaan Sebesar Rp.437.832.200,- terdiri dari Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Sebesar Rp.84.000.000,-, Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp.244.837.200 dan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya sebesar Rp.47.995.000,-.
6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp.813.010.000,- Belanja Perjalanan Dalam Kota sebesar Rp.38.010.000 dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota sebesar Rp. 200.000,-.

*Belanja Modal*

*Rp.688.808.000*

### **B.5. Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal TA 2020 dan 2019 adalah Masing-masing sebesar Rp.688.808.000,- dan Rp.0, Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal TA 2019 tidak ada karena satker institut Seni Budaya Indonesia Aceh (677538) sebagai entitas akuntansi dari kementerian pendidikan dan kebudayaan (BA 023) sehingga tidak ada perbandingan belanja di tahun 2019.

Penjelasan Belanja Modal TA 2020 adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan Peralatan Pendidikan dan Pembelajaran melalui pengadaan langsung sebesar Rp. 199.760.000,-
2. Pengadaan Kendaraan Roda 2 melalui e-catalog sebesar Rp. 37.882.000,
3. Pengadaan Peralatan Pendidikan Prodi Desain komunikasi visual melalui Pengadaan Langsung Sebesar Rp. 20.600.000,-
4. Pengadaan Peralatan Pendidikan Prodi Kriya Seni melalui Pengadaan Langsung Sebesar Rp. 18.000.000,-
5. Pengadaan Peralatan Pendidikan Prodi Seni Rupa Murni melalui Pengadaan Langsung Sebesar Rp. 7.500.000,-
6. Pengadaan Peralatan Pendidikan Prodi Seni Karawitan melalui Pengadaan Langsung Sebesar Rp. 19.600.000,-
7. Pengadaan Peralatan Pendidikan Prodi Seni Teater melalui Pengadaan Langsung Sebesar Rp. 14.200.000,-
8. Pengadaan Peralatan Perkantoran Melalui Pengadaan Langsung Sebesar Rp.46.134.000,-
9. Pengadaan Mobilier Pendidikan dan Pembelajaran Melalui E-Katalog Sebesar

Rp. 146.812.000,-

10. Pengadaan Peralatan Pendukung Jaringan Komputer Melalui Pengadaan Langsung Sebesar Rp. 56.000.000,-

11. Pengadaan Server Pendukung Pendidikan Melalui Pengadaan Langsung Sebesar Rp. 132.320.000

#### Perbandingan Realisasi *Belanja* Modal TA 2020 dan 2019

Uraian	Realisasi TA 2020	Realisasi TA 2019	naik (turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	688.808.000	0	
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	
Belanja Modal Jalan, irigasi dan Jaringan	0	0	
Belanja Modal Lainnya	0	0	
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>688.808.000</b>	<b>0</b>	
Pengembalian	0	0	
<b>Jumlah</b>			

#### **B.5.1. Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja Modal tanah tidak dianggarkan dalam DIPA ISBI Aceh.

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2020 tidak ada karena satker Institut Seni Budaya Indonesia Aceh (677538) sebagai entitas akuntansi dari kementerian pendidikan dan kebudayaan (BA 023) merupakan satker yang mengalami perubahan unit eselon pada TA 2020.

#### **B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan mesin TA 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar RP.688.808.000 dan Rp.0. Realisasi Belanja Modal peralatan dan Mesin TA 2019 belum ada karena Satker Institut Seni Budaya Indonesia Aceh (677538) sebagai entitas akuntansi dari kementerian pendidikan dan kebudayaan (BA 023) merupakan satker baru yg telah berhasil dilikuidasi dari BA 042.01 ke 023.17 pada Agustus 2020 dan pengadaan modal tahun 2019 masih pada BA 042.d. Rincian Belanja modal peralatan dan mesin disajikan dalam table berikut ini:



1.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

URAIAN	REALISASI TA 2020	REALISASI TA 2018	NAIK (TURUN) %
Modal Peralatan dan Mesin	688.808.000	0	0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>688.808.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja	-	-	0,00
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>688.808.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan R0. Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2020 tidak mengalami kenaikan/penurunan dikarenakan tidak tersedianya pagu anggaran untuk kegiatan belanja modal gedung dan bangunan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2020	REALISASI T.A 2019	NAIK (TURUN) %
BelanjaModal Gedung dan Bangunan	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**B.5.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 30 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2020 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0,00 persen dibandingkan Realisasi TA 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan tidak adanya belanja modal untuk kegiatan penambahan jalan, irigasi, dan jaringan.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung, Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI per 31/12/2020	REALISASI per 31/12/2019	Naik (Turun) %
Belanja Modal Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**B.5.5. Belanja Modal Lainnya**

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 tidak ada kenaikan dibandingkan Realisasi Belanja Modal lainnya per 31 Desember 2020. Hal ini disebabkan tidak adanya pagu anggaran untuk kegiatan tersebut.

Uraian Jenis Belanja	30-Dec-20	30-Dec-19	Naik(Turun) %
Modal Lainnya	0	0	0%
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<i>Pengembalian Belanja</i>	0	0	0%
<b>Jumlah Belanja Bersih</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

*Belanja Bantuan Sosial Rp0*

**B.6 Belanja Bantuan Sosial**

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada 31 Desember 2020 tidak mengalami kenaikan/penurunan hal ini disebabkan tidak adanya pagu Belanja Bantuan Sosial dalam DIPA ISBI Aceh Periode 31 Desember 2020.

*Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial  
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

URAIAN	REALISASI per 30/09/2020	REALISASI per 30/06/2019	NAIK (TURUN) %
-	0	0	0,00
-	0	0	0,00
<b>Jumlah Belanja Kotor</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pengembalian	-	-	-
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

### ASET

#### C.1 Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.18.234.366,- dan Rp.0.

Aset lancar merupakan asset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada institut Seni Budaya Indonesia Aceh per 31 Desember 2020 dan 2019 disajikan pada table berikut ini:

*Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2020 dan 2019*

No	Aset Lancar	31/12/2020	31/12/2019
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	-	0
2	Kas Lainnya dan Setara Kas		
3	Piutang Bukan Pajak		
4	Penyisihan Piutang tidak tertagih- Piutang bukan Pajak		
5	Piutang Bukan Pajak(Netto)		
6	Persediaan	18.234.366	0
	<b>Jumlah</b>	<b>18.234.366</b>	<b>0</b>

Berdasarkan table diatas, saldo aset lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp.18.234.366,- dan Desember 2019 Sebesar Rp.0 Karena Institut Seni Budaya Indonesia Aceh (677538) sebagai entitas akuntansi dari kementerian pendidikan dan kebudayaan (BA 023) satker yang mengalami perubahan unit eselon pada TA 2020.

*Kas di Bendahara  
Penerimaan  
Rp 64.597.*

#### C.1.1 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar masing-masing Rp.64.597,- dan Rp0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Saldo Kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari Jasa Giro yang sudah diterima oleh Bendahara penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

*Rincian Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2020 dan 31  
Desember 2019*

Keterangan	31/12/2020	31/12/2019
Uang di rekening	64.098	-
Uang Tunai	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>64.098</b>	<b>-</b>

*Kas Lainnya dan Setara  
Kas Rp0*

**C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas**

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2020 dan 30 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp. 0,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara penerimaan yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas 31 Desember 2020 dan 31 Desember  
2019*

Keterangan	31/12/2019	31/12/2018
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Piutang PNBPN Rp0*

**C.1.3. Piutang PNBPN**

Saldo Piutang PNBPN per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0. Piutang PNBPN merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNBPN disajikan sebagai berikut:

*Rincian Piutang PNBPN 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

Uraian	31/12/2020	31/12/2019
Piutang PNBPN	-	-
Piutang Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Bagian Lancar Tagihan  
TP/TGR  
Rp0

#### C.1.4 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian Bagian Lancar TP/TGR adalah sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TP/TGR 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

No	Nama	30/06/2020	30/06/2019
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
Jumlah		-	-

Bagian Lancar TPA  
Rp0

#### C.1.5. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut:

*Rincian Bagian Lancar TPA 31 Des 2020 dan 31 Des 2019*

No	Nama	30/06/2020	30/06/2019
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
Jumlah		-	-

Penyisihan Piutang Tak  
Tertagih – Piutang Lancar  
Rp0

#### C.1.6. Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Piutang Bukan Pajak</b>			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TP/TGR</b>			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Bagian Lancar TPA</b>			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-		-

*Belanja Dibayar di Muka  
Rp0*

### C.1.7. Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Dibayar di Muka 31 Des 2020 dan 31 Des 2019*

Jenis	31/12/2020	31/12/2019
Pembayaran Internet	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
<b>Jumlah</b>	-	-

*Pendapatan yang Masih  
Harus Diterima Rp0*

### C.1.8 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan

hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima berdasarkan jenis pendapatan sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

Jenis	30/09/2020	30/09/2019
Pendapatan Jasa Pelatihan	-	-
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

*Persediaan Rp18.170.268*

### C.1.9 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing adalah sebesar Rp18.170.268 dan Rp0.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Persediaan 31 Des 2020 dan 31 Des 2019*

Jenis	31/12/2020	31/12/2019
Barang Konsumsi	14.086.023	-
Barang untuk Pemeliharaan	4.084.245	-
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>18.170.268</b>	<b>-</b>

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

*Tagihan TP/TGR  
Rp0*

### C.1.10. Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.



Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Tagihan TP/TGR 31 Des 2020 dan 31 Des 2019*

No	Debitur	06/06/2020	30/06/2019
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

*Tagihan Penjualan  
Angsuran  
Rp0*

**C.1.11. Tagihan Penjualan Angsuran**

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Rincian Tagihan PA untuk masing-masing debitur adalah sebagai berikut:

*Rincian Tagihan TPA 31 Des 2020 dan 31 Des 2019*

No	Debitur	31/12/2017	31/12/2016
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>-</b>	<b>-</b>

*Penyisihan Piutang Tak  
Tertagih – Piutang  
Jangka Panjang  
Rp0*

**C.1.12. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang**

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang untuk masing-masing kualitas piutang adalah sebagai berikut:

*Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang 31  
Desember 2020*

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
<b>Tagihan TP/TGR</b>			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Tagihan PA</b>			
Lancar	-	0,00%	-
Kurang Lancar	-	0%	-
Diragukan	-	0%	-
Macet	-	0%	-
<b>Jumlah</b>	-		-
<b>Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih</b>	-		-

### C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap  
Rp.36.207.889*

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan Desember 2019 tersaji Sebesar Rp.36.207.807.889 dan RP.0. Aset Tetap yang tersaji merupakan asset.

Rincian Aset Tetap

No	Aset Tetap	31/12/2020	31/12/2019
1	Tanah	26.205.300.000	0
2	Peralatan dan Mesin	6.784.433.560	0
3	Gedung dan Bangunan	-	0
4	jalan, Irigasi, dan Jaringan	46.400.000	0
5	Aset Tetap Lainnya	527.278.923	0
6	Kontruksi dalam Pengerjaan	7.466.497.000	0
	<b>Jumlah</b>	<b>41.029.909.483</b>	
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	- 4.822.101.594	0
	<b>Nilai Buku Aset Tetap</b>	<b>36.207.807.889</b>	

Tidak Terdapat Nilai perbedaan nilai antara SAKPA dan SIMAK BMN

*Tanah  
Rp26.205.300.000.*

#### C.2.1.Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Institut Seni Budaya Indonesia Aceh per 31 Desember 2020 dan 31 desember 2019 adalah sebesar Rp26.205.300.000,- dan tidak ada penambahan nilai sampai dengan per 31 Desember 2020, Belanja Modal Tanah tidak dianggarkan dalam DIPA ISBI Aceh.

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2020 belum kita masukkan nilainya karena belum dilakukan proses pengalihan barang milik Negara ( BMN) dari Kemenristek Brin ke Kemendikbud dan pelaporan terkait nilai tanah masih kita sajikan di laporan semester I Kemenristek BRin karena satker Institut Seni Budaya Indonesia Aceh (677538) sebagai entitas akuntansi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BA 023) merupakan satker baru yang mengalmi perubahan unit eselon pada TA 2020.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020</b>	<b>0</b>
Mutasi tambah:	26.205.300
<b>Pembelian</b>	<b>0</b>
Mutasi kurang:	
Penghentian aset dari penggunaan	-
<b>Saldo per 30 September 2020</b>	<b>26.205.300</b>

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Tanah 31 Desember 2020*

No	Luas	Lokasi	Nilai
1	- -		-
2	- -		-
3			-
4			-
<b>Jumlah</b>			<b>-</b>

*Peralatan dan Mesin*

*Rp6.784.433.560*

**C.2.2 Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 dan TA 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.6.784.433.560 dan Rp0. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2020 tidak ada karena satker Institut Seni Budaya Indonesia Aceh (677538) sebagai entitas akuntansi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BA 023) merupakan satker baru yang baru saja selesai melakukan peralihan status dari dari BA 042.01 ke (BA 023.17) pada TA 2020. Rincian belanja modal peralatan dan mesin disajikan dalam tabel berikut ini:

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp.6.784.433.560 dan Rp0. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2019</b>	<b>0</b>
Mutasi tambah:	
Pembelian	0
Hibah Barang	-
Transfer Masuk	6.784.433.560
Koreksi tambah	-
Reklasifikasi dari aset lainnya	-
Mutasi kurang:	-
Transfer Keluar	-
Penghentian dari penggunaan	-
Penghapusan	-
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>6.784.433.560</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2020	(4.725.009.240)
<b>Nilai Buku per 31 Desember 2020</b>	<b>2.059.424.320</b>

Mutasi transaksi penambahan peralatan dan mesin berupa:

- a. Pembelian Peralatan Mesin sebesar 709.808,-
- b. Transfer masuk aset peralatan dan mesin sebesar Rp.6.784.433.560

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

### *Gedung dan Bangunan*

*Rp0*

### **C.2.3 Gedung dan Bangunan**

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 30 September 2020</b>	<b>-</b>
Mutasi tambah:	
Pembangunan tambahan ruang kelas	-
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 30 September 2020</b>	<b>-</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 September 2020	-
<b>Nilai Buku per 30 September 2020</b>	<b>-</b>

Tidak terjadinya transaksi penambahan Gedung dan Bangunan karena belum adanya belanja modal gedung permanen yang berasal dari DIPA ISBI Aceh selama Tahun Anggaran 2020.

### *Jalan, Jaringan dan Irigasi*

*Rp46.400.000.*

### **C.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.46.400.000 dan Rp0 adalah nilai

mutasi tambah hasil likuidasi dari transfer masuk BA 042 ke BA 023. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2020</b>	<b>46.400.000</b>
Mutasi tambah:	
Penambahan jaringan teknologi informasi	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi Pencatatan nilai	-
<b>Saldo per 30 September 2020</b>	<b>46.400.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2020	(7.066.667)
<b>Nilai Buku per 30 September 2020</b>	<b>39.333.333</b>

Mutasi tambah/kurang:

- Tidak terjadinya mutasi tambah/kurang pada Tahun Anggaran 2020 ini. Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tetap Lainnya*  
*Rp.527.278.923*

### C.2.5 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp.527.278.923,-, dan Rp.0. Aset tetap Lainnya tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Periode 31 Desember 2020, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2020</b>	<b>527.278.923</b>
Mutasi tambah:	0
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
<b>Saldo per 30 September 2020</b>	<b>527.278.923</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2020	(90.025.687)
<b>Nilai Buku per 30 September 2020</b>	<b>437.253.236</b>

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Konstruksi Dalam Pengerjaan*  
*Rp7.466.497.000*

### C.2.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp7.466.497.000 dan Rp0 . Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

<b>Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2020</b>	<b>7.466.497.000</b>
Mutasi tambah:	0
-	0
Mutasi kurang:	
-	0
<b>Saldo per 30 September 2020</b>	<b>7.466.497.000</b>
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2020	-
<b>Nilai Buku per 30 September 2020</b>	<b>7.466.497.000</b>

*Akumulasi Penyusutan  
Aset Tetap  
Rp4.822.101.594*

### C.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp.4.822.101.594 dan Rp0. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2020*

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	6.784.433.560	4.725.009.240	2.059.424.320
2	Gedung dan Bangunan	0	0	0
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	46.400.000	7.066.667	39.333.333
4	Aset Tetap Lainnya	527.278.923	90.025.687	437.253.236
<b>Akumulasi Penyusutan</b>		<b>7.358.112.483</b>	<b>4.822.101.594</b>	<b>2.536.010.889</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

### C.3. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan per 31 Desember 2020 dan Desember 2019 adalah Rp855.650 dan Rp.0 Aset Lainnya Merupakan asset yang tidak dapat dikelompokkan, baik dalam asset lancar maupun Aset Tetap. Asset lainnya pada ISBI Aceh terdiri dari Aset Tak berwujud dan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya.

*Aset Tak Berwujud  
Rp3.422.600*

#### C.3.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp.3.422.600,- dan Rp.0. -. pada periode ini terjadi mutasi tambah dari hasil transfer masuk likuidasi BA 042 ke BA 023.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Tidak ada Aset Tak Berwujud pada Institut Seni Budaya Indonesia Aceh berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan per 30 Juni 2020</b>	<b>-</b>
Mutasi tambah:	3.422.600
Pembelian	
Mutasi kurang:	-
<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	<b>3.422.600</b>
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2020	(2.566.950)
<b>Nilai Buku per 30 September 2020</b>	<b>855.650</b>

Mutasi tambah:

- -
- -

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

*Rincian Aset Tak berwujud 31 Desember 2020*

Uraian	Nilai Percobaan
Software	3.422.600
-	
<b>Jumlah</b>	<b>3.422.600</b>

*Aset Lain-Lain Rp0*

**C.3.2 Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas.

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

- ✓ Penambahan adalah dari reklasifikasi ..... yang sudah dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi senilai ....
- ✓ Penghapusan .... Berupa ... senilai.....

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo per 31 Desember 2020</b>	Rp	-
<b>Mutasi Tambah:</b>		
reklasifikasi dari aset tetap	Rp	-
<b>Mutasi Kurang:</b>		
penggunaan kembali BMN yang dihentikan	Rp	-
penghapusan	Rp	-
<b>Saldo per 30 September 2020</b>		
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Desember 2020		
<b>Nilai Buku per 30 Desember 2020</b>	Rp	-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp.2.566.950.*

### C.3.3. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing Rp.2.566.950 dan Rp.0. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

#### *Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Software	3.422.600	66.950	3.355.650
<b>Jumlah</b>	<b>3.422.600</b>	<b>66.950</b>	<b>3.355.650</b>
Aset Lain-lain	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>3.422.600</b>	<b>66.950</b>	<b>3.355.650</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.



## KEWAJIBAN

Uang Muka dari KPPN  
Rp.0

### C.4. Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada Pihak  
Ketiga  
Rp0

#### C.4.1 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Institut Seni Budaya Indonesia Aceh per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

##### Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja pegawai yang masih harus dibayar	-	-
Belanja Barang yang masih harus dibayar	-	-
Utang kepada pihak ketiga lainnya	-	-
<b>Total</b>	-	

Pendapatan Diterima di  
Muka  
Rp96.479.167

#### C.4.2. Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp96.479/167 dan Rp0. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Pendapatan diterima dimuka dibawah ini merupakan biaya UKT Mahasiswa semester Ganjil selama 1 bulan yaitu periode Agustus sd Januari 2020 .Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut dengan rincian sebagai berikut:

##### Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah
Pendapatan bukan pajak lainnya diterima dimuka	96.479.167

*Beban yang Masih  
Harus Dibayar Rp0*

### **C.4.3. Beban yang Masih Harus Dibayar**

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Perbandingan Rincian Beban yang Masih Harus Dibayar 31 Desember 2020  
dan 31 Desember 2019*

uraian	31-Dec-20	31-Dec-19
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Jumlah</b>		

*Ekuitas  
Rp36.226.897.905.*

### **C.5 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp36.226.897.905 dan Rp0. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Pendapatan PNPB  
Rp1.114.133.229.

## D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp1.114.133.229. dan Rp.0..  
Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

URAIAN	TH 2020	TH 2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Pendidikan	1.108.625.000	0	0%
Pendapatan ujian/seleksi masuk	5.100.000	0	0%
Pendapatan jasa Lembaga Keuangan	408.229		
<b>Jumlah</b>	<b>1.114.133.229</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Pendapatan Pendidikan dan Pendidikan Lainnya berasal dari iuran SPP Mahasiswa ISBI Aceh dan juga jasa lembaga Keuangan.

Beban Pegawai  
Rp2.964.829.239

### D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp2.964.829.239 dan Rp.0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Rincian Beban Pegawai 30 September 2020 dan 30 September 2019*

URAIAN	31/12/2020	31/12/2019	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	2.893.920.481	-	0%
Beban Tunjangan-tunjangan	-	-	0%
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	0%
Beban Lembur	70.909.000	-	0%
<b>Jumlah</b>	<b>2.964.829.481</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Pengembalian Belanja		242	
<b>Jumlah</b>	<b>2.964.829.239</b>		

Beban Persediaan  
Rp.31.031.437

### D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp31.031.437 dan Rp0. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

URAIAN	31/12/2020	31/12/2019	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	21.797.137	-	
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	
Beban Persediaan Suku Cadang			
Beban Persediaan Lainnya	-	-	
<b>Jumlah</b>	<b>21.797.137</b>	<b>-</b>	

Beban Barang dan  
Jasa  
Rp4.972.446.422

### D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2020 dan 30 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp4.972.446.422 dan Rp.0.

Beban Jasa adalah Konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN JENIS BEBAN	31/12/2020	30/09/2019	NAIK (TURUN) %
Beban Keperluan Perkantoran	2.584.786.600	0	100%
Beban Pengiriman Surat Pos Pusat	1.225.000	0	100%
Beban Honor Satuan Kerja	219.783.000	-	100%
Beban Barang Operasional Lainnya	1.728.000	-	100%
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi covid-19	11.605.000		
Beban Bahan	394.946.200	-	100%
Beban Honor Output Kegiatan	80.700.000	-	100%
Beban Barang Non Operasional Lainnya	793.138.000	-	100%
Beban Barang Operasional-Penanganan Pandemi covid-19	41.440.000		
Beban Langganan Listrik	219.255.954	-	100%
Beban Langganan Air	36.225.800	-	100%
Beban Langganan Telfon	-	-	#DIV/0!
Beban Sewa	305.603.000	-	100%
Beban jasa profesi	168.000.000	-	100%
Beban Jasa lainnya	114.009.868	-	100%
Beban Aset Ekstrakomtable Peralatan dan Mesin	-	-	0%
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>4.972.446.422</b>	<b>0</b>	<b>100%</b>

Beban Pemeliharaan  
Rp386.542.735

#### D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp386.542.735 dan Rp0. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 30 September 2020 dan 30 September 2019

URAIAN JENIS BEBAN	31/12/2020	31/12/2019	NAIK (TURUN) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	84.000.000	-	0%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	244.837.200	-	0%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	47.995.000	-	0%
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	9.710.535	-	0%
<b>Jumlah</b>	<b>386.542.735</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>

Beban Perjalanan Dinas  
Rp.852.085.838

#### D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.852.085.838 dan Rp0. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir

tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	31/12/2020	30/12/2019	NAIK (TURUN)
Beban Perjalanan Biasa	813.875.838	-	100%
Beban Perjalananan Dinas Dalam Kota	38.010.000	-	100%
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	200.000	-	100%
Beban Perjalanan Biasa- Luar Negri	-	-	0%
<b>Jumlah</b>	<b>852.085.838</b>	<b>-</b>	<b>100%</b>

*Beban Barang untuk  
Diserahkan kepada  
Masyarakat Rp0.*

**D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat**

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0. dan Rp0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada periode 31 Desember 2020. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	31/12/2020	31/12/2019	NAIK (TURUN) %
Beban Tanah untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-	0%
Beban Barang Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat/pemda	-	-	0%
Beban Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	0%
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>

*Beban Bantuan  
Sosial Rp0*

**D.8 Beban Bantuan Sosial**

Beban Bantuan Sosial Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban bantuan sosial

merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Penurunan beban bansos karena adanya penghematan alokasi anggaran. Rincian Beban Bantuan Sosial untuk Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

URAIAN JENIS BEBAN	30/09/2020	30/09/2019	% NAIK (TURUN)
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	0	0	0,00
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

*Beban Penyusutan dan Amortisasi  
Rp.488.296.941*

**D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp488.296.941 dan Rp0. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi*

*31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31/12/2020	31/12/2019	NAIK (TURUN) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	485.013.199	-	0%
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	666.667	-	0%
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	2.189.250	-	0%
Beban Amortisasi Software	427.825	-	
<b>Jumlah Penyusutan</b>	<b>488.296.941</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>
Beban Amortisasi Software	-	-	#DIV/0!
Beban Penyusutan aset lain-lain	-	-	
<b>Jumlah Amortisasi</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>#DIV/0!</b>

Beban Penyisihan  
Piutang Tak Tertagih  
Rp0

#### D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih  
31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

URAIAN JENIS BEBAN	30/09/2020	30/069/2019	NAIK (TURUN) %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	0	0	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Surplus dari Kegiatan  
Non Operasional  
Rp0.

#### D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2020 dan 31 Desember  
2019

URAIAN	30/09/2020	30/09/2019	NAIK (TURUN) %
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	#DIV/0!
-	0	0	0,00
-	0	0	0,00
-	0	0	0,00
<b>Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Pos Luar Biasa Rp0

#### D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:



*Rincian Pos Luar Biasa 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019*

<b>URAIAN</b>	<b>30/09/2019</b>	<b>30/09/2018</b>	<b>NAIK (TURUN) %</b>
Pendapatan PNB	0	0	0,00
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0,00
Beban Persediaan	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

## PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

*Ekuitas Awal Rp0.*

### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

*Defisit LO*

*Rp8.581.099.383*

### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp.8.581.581.099.383 dan Rp.0. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Koreksi Nilai*

*Persediaan*

*Rp0*

#### **E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan**

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar RP.0. dan RP.0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2020 adalah sebagai berikut :

##### *Rincian Koreksi Nilai Persediaan*

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	RP.
Suku Cadang	RP.
Barang Persediaan Lainnya	RP.
Jumlah	RP.

*Koreksi Nilai*

*Persediaan Rp0*

#### **E.3.2 Selisih Revaluasi Aset Tetap**

Selisih revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 September 2019 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0

*Koreksi Aset Tetap*

*Non Revaluasi Rp0*

#### **E.3.3 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi**

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Periode 31 Desember 2020

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	-
Gedung dan Bangunan	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>

Koreksi Lain-Lain

Rp0

**E.3.4 Koreksi Lain-Lain**

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 30 September 2019 adalah sebesar Rp325.376 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Lainnya	<b>Rp 325.376</b>
Koreksi Beban	-
Koreksi Pendapatan	-
Koreksi Piutang	-
Koreksi Kewajiban	-
Koreksi Hibah	-

Transaksi Antar

Entitas

Rp44.807.671.912

**E.3.5 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp44.807.671.912 dan Rp.0 Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	9.971.025.699
Diterima dari Entitas Lain	(1.114.394.507)
Transfer Masuk	35.951.040.720
Transfer Keluar	
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
<b>Jumlah</b>	<b>44.807.671.912</b>

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

### E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2020, DDEL sebesar Rp0 sedangkan DKEL sebesar Rp0

### E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp0 terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	Barang Konsumsi	042.01.400877	3.888.240
2	Tanah	042.01.400877	26.205.300.000
3	Peralatan dan Mesin	042.01.400877	6.068.625.560
4	Peralatan dan Mesin	042.01.400877	6.000.000
5	Jaringan	042.01.400877	6.400.000
6	Aset Tetap Lainnya	042.01.400877	527.278.923
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	042.05.401371	7.466.497.000
8	Software	042.01.400877	3.422.600
9	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	042.01.400877	(4.239.996.041)
10	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	042.01.400877	-
11	Akumulasi Penyusutan Jaringan	042.01.400877	(6.400.000)
12	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap lainnya	042.01.400877	(87.836.437)
13	Akumulasi Amortisasi Software	042.01.400877	(2.139.125)
<b>Jumlah</b>			<b>Rp 35.951.040.720</b>

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp0.

### E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp0,- dari total Rp0,- yang diterima sepanjang periode 31 Desember 2019.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk periode 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1			Rp -
2			Rp -
<b>Total Pengesahan</b>			<b>Rp -</b>
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
<b>Jumlah</b>			<b>Rp -</b>

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Periode 31 Desember 2020 disajikan pada lampiran.

*Ekuitas Akhir*

*Rp36.226.897.905*

#### **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 adalah masing-masing sebesar Rp36.226.897.905 dan Rp0.

## F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

### F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

- ✓ Pada tanggal 31 Desember 2020 di rekening Bendahara Penerimaan masih ada Selisih kas Rp.4.500 yang disebabkan oleh pemotongan administrasi bank Syariah bulan Januari dan Agustus. Untuk menanggulangi hal tersebut Bendahara Penerimaan sudah mengkomunikasikan kepada pihak Bank BSM untuk menghilangkan potongan administrasi tersebut.
- ✓ Masih ada Saldo sebesar Rp.64.597 yaitu jasa lembaga keuangan bulan Desember yang belum disetorkan
- ✓ Adanya KDP Hasil transfer masuk likuidasi dan eks.kemenristekdikti (BA.042) ke kemendikbud (BA.023) Sebesar 7.466.497.000,- yang merupakan pekerjaan perencanaan Pembangunan Kampus ISBI Aceh yang diperoleh TA 2019. KDP tersebut belum ada yang menjadi asset definitive dikarenakan belum adanya anggaran untuk melanjutkan Pembangunan sampai Tahun Anggaran 2020. Dengan rincian :
  1. Penyusunan Dokumen Amdal Pembangunan Prasarana Kampus ISBI Aceh dengan Nomor : 1/SPKS/ISBI-ACEH/AMDAL/2019 tanggal 30 April 2019 sebesar Rp. 992.277.000,-
  2. Perencanaan Master Plan Pembangunan Kampus ISBI Aceh dengan Nomor : 01/SPK/ISBI-ACEH/S/2019 tanggal 02 Mei 2019 sebesar Rp. 1.859.220.000,-
  3. Detail Engineering Design (DED) pembangunan Gedung dan Infrastruktur Kampus ISBI Aceh dengan Nomor 02/SPK/ISBI-ACEH/S/2019 tanggal 01 Oktober 2019 sebesar Rp.4.515.000.000,-
  4. Administrasi Proyek Sebesar Rp.100.000.000,-
- ✓ Adanya jurnal umum akibat timbulnya peralatan dan mesin belum diregister, sebesar Rp. 21.000.000,- yang disebabkan adanya kesalahan akun belanja di DIPA pada belanja barang (52) seharusnya menggunakan akun belanja modal (53) karena asset tersebut memenuhi kriteria asset tetap yang masa penggunaannya lebih dari satu tahun dan nilainya diatas nilai kapitalisasi sehingga membentuk asset tetap intrakomplek yang nilainya muncul di neraca SIMAK BMN berupa peralatan dan mesin yaitu pembelian wastafel portable dengan jumlah 3 unit.
- ✓ Adanya jurnal umum akibat timbulnya Jaringan belum diregister, sebesar Rp. 40.000.000,- yang disebabkan adanya kesalahan akun belanja di DIPA pada belanja barang (52) seharusnya menggunakan akun belanja modal (53) karena

asset tersebut memenuhi kriteria asset tetap yang masa penggunaannya lebih dari satu tahun dan nilainya diatas nilai kapitalisasi sehingga membentuk asset tetap intrakomptele yang nilainya muncul di neraca SIMAK BMN berupa jaringan yaitu Pengadaan sarana Air bersih dengan jumlah satu paket.

## F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 387/M/KPT/2016 Tanggal 28 Desember 2016 Tentang Pejabat Perbendaharaan Pada Institut Seni Budaya Indonesia Aceh Tahun Anggaran 2017 dan Keputusan Rektor Institut Seni Budaya Indonesia Aceh Nomor: 01/IT11/KU/2020 Tanggal 11 Mei 2020 Tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Institut Seni Budaya Indonesia Aceh Tahun Anggaran telah ditetapkan Pejabat Pengelola Keuangan, sebagai berikut:

Semula:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Dr. Ir. Mirza Irwansyah, MBA., MLA
Pejabat Pembuat Komitmen	: Al Munzir, S.Pd.I, M.Si
Pejabat Penandatanganan/Penguji	: Zahrul Fuadi, ST. M.Sc

SPM

Menjadi:

Kuasa Pengguna Anggaran	: Dr. Ir. Mirza Irwansyah, MBA, MLA
Pejabat Pembuat Komitmen	: Al Munzir, S.Pd.I, M.Si
Pejabat Penandatanganan/Penguji	: Ir. Syahrizal, M.T

SPM

Bendahara Pengeluaran	: Ikhsan
Bendahara Penerimaan	: Ammar Yasir, S.Pd
Pengolah Pengelolaan Administrasi Belanja	: Amrullah, SE
Pegawai	

Institut Seni Budaya Indonesia Aceh dalam Tahun 2020 menerima Pagu Anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN) sebesar Rp.11.754.494.000,- dengan nomor SP DIPA-023.17.2.677538/2020 tanggal 27 Desember 2019 dan telah menjadi revisi sebagai berikut:

1. Revisi 1 dengan pagu anggaran sebesar Rp 11.754.494.000,- dengan nomor DIPA-023-17-677538 tanggal 17 Maret 2020. Adapun perubahan ini dilakukan karena perpindahan satker dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menuju Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dikarenakan terjadi perpindahan Kementerian, kode satker juga ikut berubah dari DIPA-042-01-400877 menuju DIPA-023-17-677538.
2. Revisi 2 dengan pagu anggaran sebesar Rp 11.754.494.000,- dengan nomor DIPA-023-17-677538 tanggal 21 April 2020. Adapun keperluan pergeseran anggaran antar kegiatan dalam satu output dilakukan karena bentuk penanganan pencegahan pandemi *Covid-19* dan memfasilitasi kegiatan pembelajaran mahasiswa.
3. Revisi 3 dengan pagu anggaran sebesar Rp 11.754.494.000,- dengan nomor DIPA-023-17-677538 tanggal 4 Mei 2020. Adapun keperluan pergeseran antar keluaran, satu kegiatan dan satu satker dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja pegawai, biaya operasional, dan penanganan pencegahan pandemi *Covid-19*.
4. Revisi 4 dengan pagu anggaran sebesar Rp 11.754.494.000,- dengan nomor DIPA-023-172-677538 tanggal 15 Mei 2020. Adapun keperluan pergeseran antar output untuk penambahan biaya penanganan covid-19 berupa pembuatan wastafel, penyesuaian belanja pegawai, kegiatan kemahasiswaan, serta sarana dan prasarana.
5. Revisi 5 dengan pagu anggaran sebesar Rp 11.754.494.000,- dengan nomor DIPA-023-172-677538 tanggal 12 Agustus 2020. Adapun keperluan pergeseran Satu output untuk penyesuaian kebutuhan belanja pegawai, kegiatan kemahasiswaan, penyesuaian bahan praktikum, Bantuan Pembelajaran daring, penyesuaian tunjangan umum PNS, Operasional perkantoran, penyesuaian belanja dinas, serta sarana dan prasarana.
6. Revisi 6 dengan pagu anggaran sebesar Rp 11.754.494.000,- dengan nomor DIPA-023-172-677538 tanggal 4 September 2020. Adapun keperluan pergeseran dalam satu output untuk penyesuaian kebutuhan kegiatan tata kelola dan kelembagaan, penyesuaian tunjangan tugas tambahan, operasional dan pemeliharaan perkantoran.
7. Revisi 7 Adanya penambahan pagu anggaran sebesar Rp 681.090.000. Sehingga dari Rp 11.754.494.000 setelah penambahan pagu, maka menjadi Rp 12.435.584.000 dengan nomor SP-DIPA 023.172.677538/2020 tanggal 4 September 2020. Adapun penambahan pagu tersebut dialokasikan untuk penambahan gaji dan tunjangan PNS.
8. Revisi 8 dengan pagu anggaran Rp 12.435.584.000 dengan nomor SP-DIPA 023.172.677538/2020 tanggal 13 November 2020. Adapun perubahan yg dilakukan adalah adanya perubahan dalam satu output untuk: Penyesuaian kebutuhan kegiatan wisuda,



Pameran dan pertunjukan seni, Pelaksanaan PEKSIMINAS, Sosialisasi SIMPEG, pembuatan aplikasi SIRAJA, kongres pembentukan alumni ISBI Aceh, Survei kepuasan dosen dan tendik, belanja gaji pokok PNS, langganan daya dan jasa, biaya langganan air, dan gas, dan biaya jasa internet

9. Revisi 9 dengan pagu anggaran Rp 12.435.584.000 dengan nomor SP-DIPA 023.172.677538/2020 tanggal 13 November 2020. Adapun perubahan yg dilakukan adalah adanya perubahan dalam satu output untuk: pemeliharaan roda 4, operasional perkantoran pimpinan.
10. Revisi 10 dengan pagu anggaran Rp 12.435.584.000 dengan nomor SP-DIPA 023.172.677538/2020 tanggal 4 Desember 2020. Adapun perubahan yg dilakukan adalah adanya perubahan dalam satu output untuk: Belanja keperluan raker, dan sewa akun pangkalan data.

Institut Seni Budaya Indonesia Aceh dalam Tahun 2020 menerima Pagu Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi Covid-19 Belanja Barang dan Jasa ( 521131) dengan realisasi sebesar Rp. 11.605.000 dan Belanja Barang Non Operasional (521241) Sebesar Rp. 41.440.000, dengan rincian Sebagai berikut :

- Belanja Barang dan Jasa ( 521131):
  1. Face shield 252 Lembar sebesar Rp.3.780.000,-
  2. Hand Sanitizer 60 Botol Sebesar Rp. 4.500.000,-
  3. Masker 350 Lembar sebesa Rp.3.325.000,-
- Belanja Barang Non Operasional (521241) :
  1. Bantuan Langsung Daring Sebesar Rp. 29.590.000
  2. Desinfektan sebanyak 30 Liter Sebesar Rp. 2.250.000
  3. Pengukur Suhu Sebanyak 10 Unit Sebesar Rp. 7.800.000,-

## VI. LAMPIRAN DAN DAFTAR

